

# Simsalabim Cabut Dukungan ....

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

anggota DPRD Fraksi PDIP, 7 anggota DPRD Fraksi PKB, dan 1 anggota DPRD dari Fraksi Gerindra. Padahal sebelumnya ada 23 anggota dewan yang menyetujui penggunaan hak interpelasi. Pada forum sidang paripurna, sebagian para anggota dewan itu mendadak mencabut penggunaan hak interpelasi yang pernah mereka usulkan.

"Salah satu di antaranya karena penggunaan anggaran Covid-19 belum ada audit BPK," ujar anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Danu Hamidi mengatakan alasan 7 dari 8 anggota dewan dari fraksinya mencabut usulan hak interpelasi yang sebelumnya sudah ditandatangani dan diusulkan oleh mereka.

Sejumlah anggota dewan dari Fraksi Golkar pun mencabut usulannya. Dengan alasan, sejauh ini Pemkab Karawang telah memberi-

kan jawaban yang tertulis dan terperinci mengenai penggunaan anggaran Covid-19.

"Saya Siadah Anwar dengan ini mencabut tandatangan saya," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Karawang, Asep Syaripudin membacakan surat pencabutan dukungan interpelasi abggita fraksinya, Sidah Anwar.

"OPD telah memberikan jawaban tertulis dan terperinci beberapa pertanyaan dan usulan terkait penggunaan anggaran covid," timpal Ibe melanjutkan---menyebut alasan Saidah mencabut dukungan penggunaan hak interpelasi.

Di tengah-tengah sidang, sejumlah anggota DPRD Fraksi PDIP--yang dari awal menginisiasi penggunaan hak interpelasi, mempertanyakan rekan mereka sesama anggota DPRD dari fraksi lain yang tiba-tiba

mencabut usulan penggunaan hak interpelasi.

"Jika dari awal saudara tahu belum ada audit BPK, kenapa saudara-saudara mendatangkan usulan hak interpelasi. Inikan jadi seperti dagelan," kata anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Toto Suropto.

"Lanjut atau tidaknya penggunaan hak interpelasi tidak bisa digugurkan oleh pandangan akhir fraksi," kata rekan Toto di Fraksi PDIP, Natala Sumedha yang mengusulkan voting per individu--yang kemudian voting ya tetap dimenangkan para anggota DPRD yang menolak menggunakan hak interpelasi.

Namun, kendati hak interpelasi atau hak bertanya per anggota DPRD itu urung berlanjut, namun mereka menyatakan tak menghilangkan kewajiban para pengguna anggaran covid (baca:OPD—Gugus Tugas) untuk memberikan perbaikan laporan kepada DPRD Karawang. (mhs)